



## TURUTI ARAHAN PRESIDEN

# Dinsos-PPPA Proses Perubahan DTKS Jadi DTSEN

**PENGASIH (KR)** - Mengikuti arahan Kementerian Sosial (Kemensos) RI sebagai tindak lanjut terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kulonprogo melaksanakan proses perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi DTSEN.

Kepala Dinsos-PPPA setempat, L Bowo Pristiyanto mengatakan, proses perubahan tersebut dilakukan dengan melakukan pengecekan langsung di lapangan. "Kami sudah mulai melakukan *groundcheck* atau pengecekan lapangan terkait arahan pusat tersebut," kata Bowo, Kamis (6/3).

Dijelaskan, jika mengacu informasi yang diterimanya, DTSEN akan memadankan tiga jenis data. Antara lain DTKS, P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi).

Dinsos-PPPA memegang data

lengkap DTKS. Sedangkan untuk data P3KE dan Regsosek dipegang Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bap- perida).

"Sampai 21 Januari 2025 ada 256.890 jiwa warga Kulonprogo yang masuk DTKS dan data ini bergerak terus bisa bertambah atau berkurang," ungkap L Bowo.

Tentang pengecekan lapangan yang dilakukan, Bowo menuturkan prosesnya meliputi validasi dan verifikasi terhadap data warga yang terdaftar. Prosesnya dilakukan seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Bowo mengaku belum tahu seperti apa implementasi dari DTSEN itu nanti. Termasuk perbedaannya dengan DTKS yang sudah sejak lama digunakan sebagai acuan dalam menyalurkan bantuan sosial.

"Kami akan merampungkan proses *groundcheck* dulu, setidaknya selama sebulan sampai tanggal 30 Maret nanti," tuturnya.

Sementara itu anggota DPRD setempat, Tukijan mendorong Pemkab

mengubah DTKS menjadi DTSEN sesuai arahan pusat. Saran tersebut sudah disampaikan Lembaga Legislatif dalam dokumen rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024.

Anggota DPRD Kulonprogo, Tukijan mengatakan, perubahan tersebut akan berdampak signifikan pada program pengentasan kemiskinan. Pasalnya ada sejumlah program bantuan untuk warga yang berpotensi dicoret.

"Baik dicoret dari penerima bantuan BPJS Kesehatan, Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dan program penanggulangan kemiskinan lainnya," jelasnya.

Politisi PDIP itu berharap Eksekutif segera melakukan mitigasi terhadap dampak tersebut. Apalagi saat ini kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial di Kulonprogo.

"Harus benar-benar memastikan, warga yang kurang mampu dapat ditangani dan mendapatkan bantuan pemerintah," tegas Tukijan. **(Rul)**